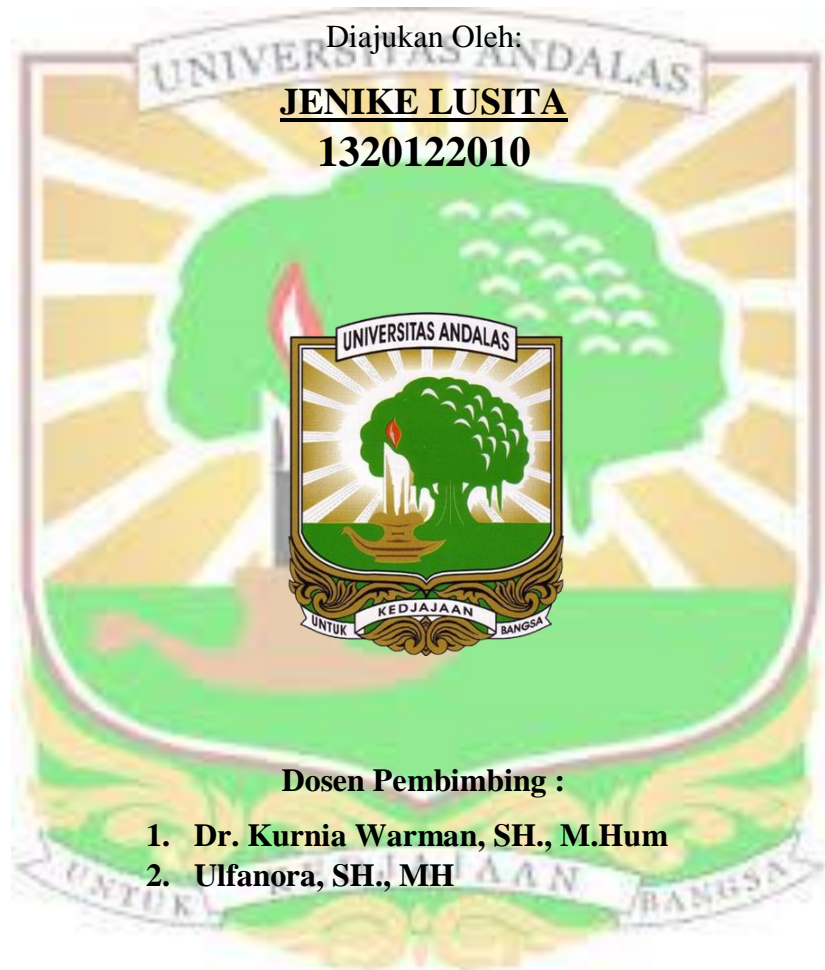


TESIS

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN  
ALAS HAK TEBAS TEBAK HUTAN DI KABUPATEN  
BATANGHARI PROVINSI JAMBI**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN ALAS HAK  
TEBAS TEbang HUTAN DI KABUPATEN  
BATANGHARI PROVINSI JAMBI**

Oleh :

**JENIKE LUSITA, SH**

**Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas**

**ABSTRAK**

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk dapat memperoleh tanah, salah satunya dengan cara membuka hutan atau melakukan tebas tebang hutan. Di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada umumnya masyarakat memperoleh tanah dengan cara melakukan tebas tebang hutan. Sehingga kebanyakan tanah yang berasal dari tebas tebang tersebut, yang akan didaftarkan haknya tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan apapun yang dapat dijadikan sebagai dasar penguasaan atau alas hak guna didaftarkan di Kantor Pertanahan tempat tanah yang bersangkutan berada. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1) Mengapa alas hak tebas tebang hutan dapat dijadikan objek Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? 2) Bagaimana proses pembuatan alas hak tebas tebang hutan sebagai dasar pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? 3) Bagaimana proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali berdasarkan alas hak tebas tebang hutan di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat *juridis empiris*. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) dalam pasal 19 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960 jo Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah diperlukan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam hal tidak ada bukti kepemilikan cukup dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ditambah keterangan dari masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) PMNA No. 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2) Alas Hak yang digunakan dalam pendaftaran tanah yang berasal dari tebas tebang hutan dibuat oleh Kepala Desa tempat tanah tersebut berada, berdasarkan identitas dan keterangan langsung dari pemilik tanah, disertai dengan tandatangan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 jo PMNA nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan dengan Perkaban No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan PP No. 128 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dan Tebas Tebang Hutan

**LAND REGISTRATION BASED ON THE OWNERSHIP EVIDENCE OF  
DEFORESTATION IN BATANGHARI REGENCY  
JAMBI PROVINCE**

**By :  
JENIKE LUSITA, SH  
Magister of Notary Program, Law Faculty, Andalas University**

**ABSTRACT**

Land is something that has an important value in Indonesian people's life. There is many ways that people can be done to acquire land, one of them with cutting down the forest. In Batanghari regency, Jambi province, in general, people acquire land with cutting down the forest. So, most of them don't have a proof of ownership to register their land in the land office of the Batanghari regency. The problems in this thesis are : 1) why can the proof of the ownership of deforest use as the evidence for land registration's object in the land office of Batanghari regency, Jambi Province? 2) How the process to make the evidence of the ownership of land from cutting down the forest as the basic to register their land in land office of Batanghari regency, Jambi Province? 3) How the process of land registration based on the evidence of ownership from cutting down the forest in the land office of Batanghari regency, Jambi Province? The research method uses empirical juridical approach. The result of the researchs are : 1) in the article 19 paragraph 2 Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law juncto article 24 government regulation No. 24 of 1997 on the land registration, mentioned that in order to register the land required proof of ownership of the land. In the event that there is no proof of ownership of sufficient evidenced by an affidavit of the physical mastery of land plus a description of the local community as set in article 60 paragraph (3) and (4) Agrarian Minister Regulation No. 3 of 1997 on Implementing Regulation of Government Regulation No. 24 of 1997 on The Land Regulation. 2) evidence of ownership used in land registry that is derived from cutting down the forest is made by the head of the village where the land is located, based on the identity and direct description from the owner of the land, accompanied by the sign of 2 (two) witness that has been appointed according to applicable legislation. 3) The process of land registration is implemented based on government regulation No. 24 of 1997 on the land registration juncto Agrarian Minister Regulation No. 3 of 1997 on Implementing Regulation of Government Regulation No. 24 of 1997 on The Land Regulation, with regard to Agrarian Minister Regulation No. 1 of 2010 on Standard Operating Procedure in National Land Agency, and Government Regulation No. 128 of 2015 on Kind of Non-Tax Revenue in The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.

Keyword : Land Registration, Deforestation